

BAB 1

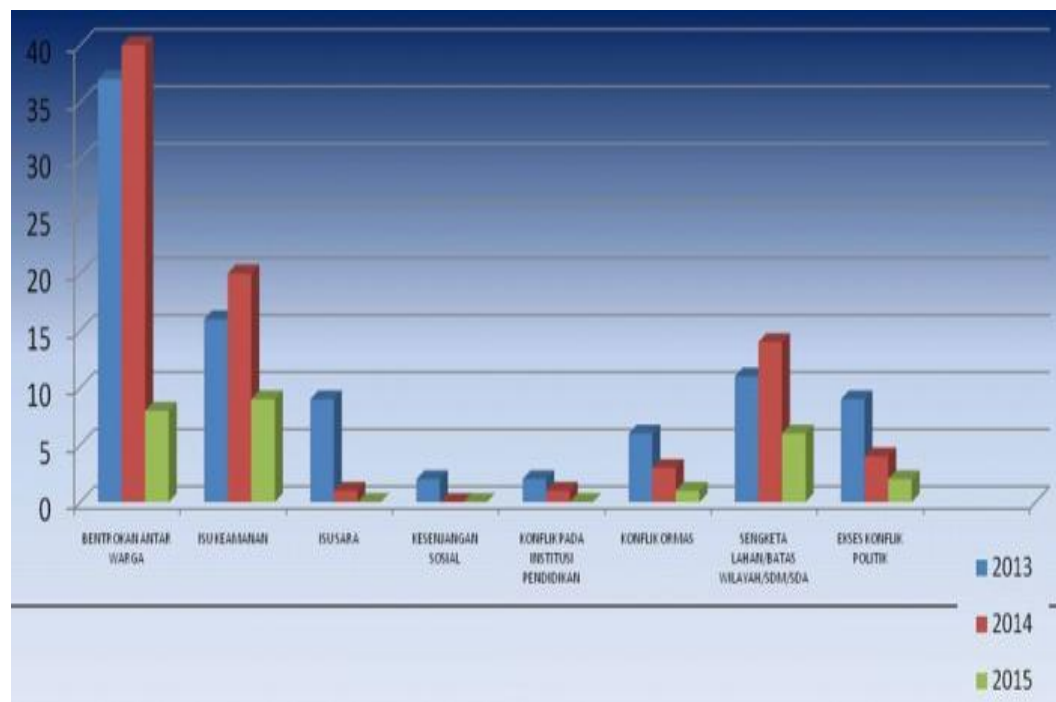
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konflik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berelasi antarmanusia. Selain karena setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing, konflik juga terjadi karena pada dasarnya struktur sosial masyarakat Indonesia itu sendiri yang majemuk. Menurut *Usman Pelly* (sebagaimana dikutip dalam *Sutirto*, 2000), kemajemukan masyarakat Indonesia dewasa ini dibedakan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal masyarakat dikelompokkan berdasar etnik dan ras atau asal usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat, agama, pakaian, makanan dan budaya material lainnya. Di sisi lain terdapat perbedaan vertikal yang dikelompokkan berdasar penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik.

Suatu kenyataan demografis bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237.641.326 jiwa, terdiri 656 kelompok etnis serta 1.331 suku bangsa dan 79,5 % dari seluruh populasi penduduk usia 5 tahun ke atas melakukan komunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa daerah (*Badan Pusat Statistik Nasional*, 2010). Tidak heran apabila negara kepulauan yang kaya akan sumber daya ini, juga dijuluki sebagai miniatur dunia dengan tingkat kemajemukan paling tinggi. Jika dikaitkan dengan lingkungan strategis, fakta tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai modal pertahanan dan potensi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkaitan dengan hal tersebut, *Nurmantyo* (2016) menyatakan bahwa “Sebenarnya bangsa Indonesia memiliki banyak potensi, kekuatan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh berbagai komponen bangsa. Tetapi keunggulan-keunggulan tersebut tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan” (hal. 35).

Pernyataan tersebut benar adanya dengan didukung oleh banyaknya konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan pada tahun 2013-2015 terjadi 201 kasus konflik sosial yang terdiri dari kasus bentrokan antarwarga, isu keamanan, sengketa lahan, konflik politik, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik pada institusi pendidikan dan kesenjangan sosial, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Perbandingan Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Isu/Pola Konflik (2013-2015)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (*Baskoro, 2015*)

Selain itu, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tahun 2013, terdapat 184 daerah di Indonesia yang rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal. Namun, ada juga daerah maju yang interaksi sosial antarkelompok di dalamnya sangat kaku sehingga konflik mudah pecah. Indikatornya bahwa sepanjang tahun 2013, pada daerah tersebut bermunculan berbagai konflik. Kemudian, dari 184 daerah tersebut terdapat 6 daerah yang diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014, yaitu: Papua dengan 24 kasus, Jawa Barat 24 kasus, Jakarta 18 kasus,

Sumatera Utara 10 kasus, Sulawesi Tengah 10 kasus dan Jawa Tengah 10 kasus (“Ini 184 Daerah Rawan Konflik Sosial”, Maret 2014).

Data konflik di atas menyiratkan bahwa permasalahan integrasi di Indonesia masih belum tuntas, walaupun harus disadari bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan. Selain itu, konflik antarsesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali apalagi dengan komposisi masyarakat yang majemuk. Pascareformasi, konflik dengan nuansa SARA menjadi momok yang menakutkan bagi Indonesia. Berbagai peristiwa konflik besar seperti yang terjadi di Ambon, Sampit, Kerusuhan Mei 1998, pengungsian Ahmadiyah di Mataram, dan Lampung Selatan setidaknya telah menghilangkan nyawa 10.000 warga negara Indonesia (“Lima Kasus Diskriminasi Terburuk Pascareformasi”, Desember 2012).

Menjelang Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Pilgub DKI Jakarta) tahun 2017, isu SARA kembali menjadi *headline news* di berbagai media. *BBC Indonesia* misalnya, menuliskannya dengan judul “Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?” Pasca-Pilgub DKI Jakarta, isu SARA terutama yang berkaitan dengan agama masih terus berlanjut dan menjadi isu sensitif yang berpotensi memecah persatuan masyarakat. Kemudian, hal ini juga diperparah dengan mencuatnya radikalisme dari kelompok tertentu yang terus berusaha menyebarkan teror di tengah-tengah masyarakat (*Lestari*, 2017).

Banyak gagasan dan ide yang ideal secara teoretis dikemukakan oleh para akademisi dan pemangku kebijakan di berbagai forum sebagai solusi atau tanggapan atas konflik dan potensi konflik yang mungkin terjadi. Namun, realitasnya implementasi dari hal tersebut belum menyentuh hingga ke level akar rumput. Gesekan terus berulang, peristiwa-peristiwa SARA gampang tersulut baik dalam skala kecil bahkan sesekali mencuat sebagai ancaman yang menakutkan, terutama bagi kelompok minoritas. Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak dapat dibendung, ikut menjadi akselerator konflik. Kebebasan

berpendapat di media sosial mempermudah masyarakat untuk memberikan komentar terhadap peristiwa maupun isu tertentu yang justru semakin meningkatkan eskalasi konfliknya. Mayoritas masyarakat Indonesia yang belum bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi akan menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan (“Visi Inklusif Pemerintah Lokal”, Desember 2015).

Jawaban atas permasalahan yang tengah terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebenarnya telah tertulis dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yang menyebutkan bahwa:

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik (*Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014*, 2016, hal. 17).

Berkaitan dengan proses membangun persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan MPR di atas, *Nurmantyo* (2016) menyatakan: “Indonesia mempunyai sejarah sebagai bangsa yang disegani dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai luhur rakyatnya dan kearifan lokal masyarakatnya mampu menyatukan keanekaragaman budaya, tradisi dan adat-istiadat dalam kaitan kebersamaan yang saling menghormati dan menghargai” (hal. 41).

Adapun yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam hal ini sebagaimana didefinisikan oleh *Sibarani* (2012), yaitu:

Kearifan lokal adalah pengetahuan masyarakat setempat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian bagi masyarakat dalam suatu komunitas. Baginya, kearifan lokal merupakan kebenaran yang sesungguhnya karena

benar bermanfaat bagi kehidupan manusia, hal yang sama secara hakikat dengan filsafat untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya berasal dari nilai budaya yang luhur yang digunakan untuk kebijaksanaan atau kearifan menata kehidupan (p. 111-113).

Berbicara mengenai kearifan lokal dalam membangun budaya damai, Kabupaten Wonosobo dapat menjadi contohnya. Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini penduduknya terdiri dari berbagai agama, (lihat Tabel 1.1). Di tengah kemajemukan dalam struktur sosial masyarakatnya, Kabupaten Wonosobo mampu menjaga perdamaian dan toleransi. Tidak hanya itu, Wonosobo juga menjadi daerah percontohan ramah HAM yang layak dihuni oleh semua golongan.

Tabel 1.1 Penduduk Wonosobo Menurut Agama dan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah 2015 Tahun	Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan (Jiwa)					
		Lainnya 2015 Tahun	Hindu 2015 Tahun	Budha 2015 Tahun	Kristen 2015 Tahun	Katolik 2015 Tahun	Islam 2015 Tahun
Wadaslintang	59031	-	-	-	36	184	58811
Kepil	60553	-	-	-	4	14	60535
Sapuran	72366	-	4	32	38	268	72024
Kalibawang	28065	-	-	-	5	-	28060
Kaliwiro	55308	-	-	581	135	206	54386
Leksono	50849	-	-	-	46	316	50487
Sukoharjo	35170	-	20	-	64	112	34974
Selomerto	46028	36	70	-	250	1268	44404
Kaliwiro	58415	-	136	-	81	194	58004
Kertek	86876	-	29	121	1233	279	85214
Wonosobo	83324	-	467	441	2149	2422	77845
Watumalang	52979	-	1	-	2	182	52794
Mojotengah	71198	-	-	-	106	36	71056
Garung	90162	-	-	-	106	-	90056
Kejajar	41498	-	8	-	347	12	41131

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Wonosobo (2015)

Dalam berita yang dilansir *SindoNews.com* (7/3/2014), setelah deklarasi *Human Rights City* pada 2014, Wonosobo menjadi daerah percontohan ramah HAM yang layak dihuni oleh semua golongan dengan

mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar sebagai warga negara. Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan (“Wonosobo, Daerah Percontohan Ramah HAM”, Maret 2014). Lebih lanjut, *Abdurrahman Wahid Center* bahkan menyebutkan Kabupaten Wonosobo sebagai kota yang ramah terhadap kaum minoritas. Pсалnya di sana kaum Ahmadiyah dan sekte-sekte keagamaan lainnya dilindungi dan dapat hidup damai berdampingan dengan masyarakat dari agama lainnya. Penghargaan juga diberikan kepada Bupati Wonosobo dari Jaringan Antar Iman Indonesia (JAI), sebagai Tokoh Pluralisme pada tahun 2014 (“Kholiq, Bupati Guyub Perawat Keberagaman Kepala Daerah Peduli Kaum Minoritas”, Januari 2015).

Oleh karena tidak semua kelompok minoritas terwadahi, Bupati Wonosobo juga menyetujui pembentukan forum informal penyangga bernama Forum Bersama (Fober) Lintas SARA. Di sanalah Syiah (IJABI), Ahmadiyah, Tao, dan organisasi penghayat lainnya berkumpul dan berekspresi bersama kelompok mayoritas pemeluk agama lainnya di Wonosobo. Untuk menghindari gesekan antarpemeluk agama, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan berbagai langkah, baik formal maupun informal atas dasar kesadaran bahwa sejak dulu wilayah itu dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Tak ada satu pun agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya penyumbang nilai-nilai luhur masyarakat Wonosobo (“Visi Inklusif Pemerintah Lokal”, Desember 2015).

Masyarakat Kabupaten Wonosobo pada umumnya adalah bagian dari Suku Jawa dan mayoritasnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Di sisi lain, pada sebagian masyarakat Kabupaten Wonosobo, kebudayaan Jawa masih mendarah daging. Hal ini masih terlihat dengan dilaksanakannya tradisi atau ritual adat Jawa yang berbau animisme dan dinamisme. Melihat fenomena tersebut, *Suseno* (1996) menyatakan:

pandangan manusia Jawa terhadap dunia mengisyaratkan bahwa baik dunia yang secara fisik kelihatan maupun dunia yang tidak kelihatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kesatuan itu semua gejala

mempunyai tempat serta berada dalam hubungan-hubungan yang saling melengkapi dan terintegrasi satu sama lain, sehingga membentuk tata alam yang sangat teratur (p. 84).

Tradisi atau ritual yang masih terus dijaga kelestariannya sebagai warisan turun-temurun dari tiap generasi layak disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal ini jugalah yang menjadi suatu sistem nilai yang mengikat dan disepakati bersama oleh masyarakat. *De Jong* (sebagaimana dikutip dalam *Herusatoto*, 1987) menyatakan bahwa, “Suatu sikap tidak hanya berpatokan pada agama yang dianut oleh seseorang, melainkan juga dengan adat dan latar belakang kebudayaannya, bahkan juga watak bangsanya” (p. 78).

Banyak tradisi maupun ritual yang ada di Kabupaten Wonosobo, Tradisi Nyadran atau Festival Suran di Dusun Giyanti, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto merupakan salah satu tradisi yang cukup terkenal dan layak disebut sebagai miniatur Indonesia (“Ritual Nyadran Giyanti Diikuti Ratusan Warga”, Oktober 2015). Berbeda dengan Tradisi Nyadran di daerah lain di Jawa Tengah, di Dusun Giyanti, Tradisi Nyadran diikuti rangkaian kegiatan lain yang masih berkaitan dengan budaya dan tradisi khas masyarakat setempat. Adapun prosesi Tradisi Nyadran di Giyanti terdiri dari: Nyadran di Makam, Tenongan, Prosesi Upacara di Pendopo Desa, Rakanan, Festival Emblek, Lenggeran, dan Wayang Kulit.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat sekitar dan menjadi praktik nyata kerukunan antarumat beragama. Hal itu terlihat ketika hampir seluruh warga Giyanti bahu-membahu membuat *uba rampe* atau sesaji yang diperlukan untuk prosesi ritual. Wakil Panitia dalam Tradisi Nyadran tahun 2015 menyatakan, “Mulai dari membuat tenongan, menyiapkan panggung, sampai gotong royong membersihkan tempat pagelaran seni, semua warga terlibat tanpa memandang agama yang dianut. Di sini warga dengan agama dan keyakinan apapun hidup damai, dan menjunjung tinggi toleransi, sehingga layaklah bila Giyanti dijuluki Indonesia mini.” (“Nyadran Giyanti, Tradisi Tahunan yang Diklaim jadi Simbolisasi Indonesia Mini”, Oktober 2015)

Memperkuat pernyataan tersebut, Kapolres Wonosobo, AKBP Aziz Andriansyah juga ikut berkomentar mengenai Tradisi Nyadran sebagai wujud kerukunan dengan pernyataan berikut.

"Di sini kita makan, masak, dan berdoa bersama-sama tanpa perlu merisaukan perbedaan agama atau keyakinan. Keberagaman di Indonesia ini beberapa waktu terakhir tengah banyak diuji, sehingga dengan adanya acara suran lintas agama dan budaya ini, kita berharap Wonosobo bisa menjadi contoh yang baik, soal bagaimana membina keberagaman dan kerukunan." ("Di Festival Suran, Warga Beda Agama Makan Sepiring Bersama", Oktober 2016)

Kehidupan sosial masyarakat Wonosobo yang harmonis dan kaitannya dengan Tradisi Nyadran sebagai bentuk kearifan lokal yang berkontribusi dalam membangun budaya damai, menjadi alasan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Meskipun kajian mengenai kearifan lokal dan budaya damai bukan hal yang baru, belum ada penelitian yang spesifik membahas mengenai Tradisi Nyadran di Wonosobo dan nilai-nilai perdamaian yang terkandung di dalamnya dalam membangun budaya damai. Penelitian dengan tema serupa, dilakukan oleh *Purna* (2016) mengenai kearifan lokal masyarakat Desa Mbawa dalam mewujudkan toleransi beragama. Dengan latar belakang masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam agama, masyarakat Donggo di Desa Mbawa dapat memelihara harmonisasi antaranggota masyarakat.

Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mencegah dan melesaikan konflik sosial. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam setiap kearifan lokal baik dalam bentuk kesenian, permainan maupun ajaran dapat digali dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Aktualisasi dari nilai-nilai inilah yang selanjutnya akan berkontribusi bagi kemampuan sosial dalam rangka pertahanan nirmiliter. Potret kerukunan dan toleransi dalam pelaksanaan Tradisi Nyadran di Dusun Giyanti dapat menjadi contoh nyata bahwa perbedaan baik itu suku,

agama, ras maupun golongan bukan menjadi masalah yang dapat menghancurkan persatuan seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

Bertolak dari uraian permasalahan dalam latar belakang penelitian ini serta relevansinya dengan keilmuan pertahanan dan ketersediaan data, mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul: *Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran sebagai Kearifan Lokal dalam Membangun Budaya Damai di Dusun Giyanti Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo*. Penelitian ini erat kaitannya dengan kajian budaya damai sebagai salah satu komponen penyusun kemampuan pertahanan nirmiliter.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten yang mendapat penghargaan ramah minoritas ternyata mampu menjaga perdamaian dan toleransi di tengah-tengah perbedaan masyarakatnya. Terdapat satu sistem nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat melalui kearifan lokal dalam wujud Tradisi Nyadran. Keadaan demikian menjadi pertanyaan besar dalam penelitian ini, mengapa masyarakat yang majemuk di sana tetap bisa hidup berdampingan dan bagaimana kaitannya Tradisi Nyadran dengan kondisi masyarakat tersebut. Bertolak dari uraian latar belakang dan pertanyaan besar dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut.

1. Bagaimana kontribusi nilai-nilai yang terkandung pada rangkaian kegiatan Tradisi Nyadran dalam mewujudkan perdamaian di Giyanti Wonosobo?
2. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Tradisi Nyadran dalam membangun budaya damai di Giyanti Wonosobo?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Moleong (2013) menjelaskan tujuan penelitian merupakan suatu upaya dalam memecahkan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. menganalisis kontribusi nilai-nilai yang terkandung pada rangkaian kegiatan Tradisi Nyadran dalam mewujudkan perdamaian di Giyanti Wonosobo; dan
2. menganalisis aktualisasi nilai-nilai Tradisi Nyadran dalam membangun budaya damai di Giyanti Wonosobo.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Merujuk pada berbagai referensi baik buku, karya tulis ilmiah maupun pemberitaan di media, isu SARA dan perbedaan dalam masyarakat Indonesia menjadi isu sensitif yang mudah memicu terjadinya konflik. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sudah seharusnya digali kembali dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan perpecahan. Tradisi Nyadran di Giyanti sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dapat menjadi contoh bagaimana mewujudkan masyarakat majemuk yang damai dan penuh toleransi. Inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Selain untuk menggali nilai-nilai dalam rangkaian Tradisi Nyadran itu sendiri, lebih jauh hasil penelitian ini selanjutnya dapat direplikasi di daerah lain sehingga dapat berkontribusi bagi kemampuan sosial guna mewujudkan pertahanan nirmiliter Indonesia yang kuat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoretis dan praktis, berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep mengenai kajian Damai dan Resolusi

Konflik serta pertahanan nirmiliter. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kearifan lokal. Manfaat lainnya yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa dan menambah perspektif lain mengenai budaya damai yang ternyata didapatkan melalui kearifan lokal dalam bentuk Tradisi Nyadran di Giyanti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini. *Pertama*, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai saran atau masukan dalam proses pembuatan kebijakan pencegahan konflik sosial berbasis kearifan lokal. *Kedua*, sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi para akademisi dan praktisi di lapangan baik Pemerintah maupun organisasi lainnya dalam menyiapkan pendekatan lain guna membangun budaya damai di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. *Ketiga*, memberi gambaran lengkap aktualisasi nilai-nilai Tradisi Nyadran dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Giyanti yang dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mengkombinasikan kearifan lokal masing-masing.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini relevan dengan kajian ilmu pertahanan khususnya berkaitan dengan perdamaian atau budaya damai yang menjadi teori dan konsep pokok dalam program studi Damai dan Resolusi Konflik. Bertolak dari rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini dibatasi pada lingkup untuk menggali dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Nyadran serta aktualisasinya dalam membangun budaya damai di Giyanti Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Agar memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan data yang optimal, maka yang menjadi sumber dari data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara

langsung dengan berbagai narasumber terkait yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen maupun literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Berikut sistematika penulisan yang dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; terdiri dari lima subbab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran; terdiri dari subbab tinjauan pustaka yang berisi teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, diantaranya: Perdamaian, Hermeneutika, Kearifan Lokal, Budaya Damai, dan Pertahanan Negara; bahasan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian; berisi tujuh subbab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian (instrumen, data primer, data sekunder, pengujian keabsahan dan keterandalan data), dan jadwal penelitian.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan; terdiri dari tiga subbab:

Subbab objek penelitian dituliskan gambaran objek penelitian yaitu Dusun Giyanti, Sosio Kultural Masyarakat Giyanti dan Tradisi Nyadran.

Subbab analisis data dan interpretasi hasil dituliskan hasil temuan-temuan yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Nyadran dan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat Giyanti.

Subbab pembahasan menguraikan keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori dan konsep —Teori Perdamaian, Hermeneutika, Konsep Kearifan Lokal, Konsep Budaya Damai, dan Konsep Pertahanan Negara— yang digunakan terkait

kontribusi Tradisi Nyadran dalam membangun budaya damai di Giyanti Wonosobo dan korelasinya dengan pertahanan negara.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada subbab kesimpulan, dituliskan secara ringkas temuan-temuan penelitian dan menarik simpulan berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan.

Pada subbab saran, dituliskan keunggulan dan kelemahan penelitian yang direfleksikan dalam bentuk saran-saran perbaikan yang dapat diajukan.

Daftar Pustaka

Berisikan sumber-sumber dan referensi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

